

PERAN LINTAS SEKTOR DALAM KONVERGENSI PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DI KABUPATEN ROKAN HULU

Amir Syamsuadi¹, Ade Febriani², Ermayani³, Bubung Bunyamin⁴, Nursyiamah⁵

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Abdurrab

²Program Studi Kebidanan Universitas Abdurrab

³⁴⁵Perwakilan BKKBN Provinsi Riau

amir.syamsuadi@univrab.ac.id, ade.febriani@univrab.ac.id, ermayaniluwia@gmail.com,
bubung.bunyamin@bkkbn.go.id, nursyiamah20@gmail.com

Abstrak

Setelah ditetapkan sebagai daerah lokus *stunting* di Provinsi Riau pada tahun 2017 Kabupaten Rokan Hulu melakukan berbagai langkah kebijakan. Upaya tersebut diaktualisasikan dengan upaya pemerintah daerah membangun sinergitas kolaborasi antar organisasi perangkat pemerintah daerah dalam upaya penurunan *stunting* terintegrasi. Penelitian ini menganalisis dan mendeskripsikan Peran Lintas Sektor Dalam Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Rokan Hulu. Pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan bentuk penelitian lapangan dengan mengumpulkan sumber data primer dan data sekunder melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu melakukan upaya penurunan *stunting* secara terstruktur dan menyeluruh seperti melakukan identifikasi sebaran *stunting*, melakukan ketersediaan program, dan kendala dalam pelaksanaan integrasi intervensi gizi, menyusun rencana kegiatan untuk meningkatkan pelaksanaan integrasi intervensi gizi, menyelenggarakan rembuk *stunting*, memberikan kepastian hukum bagi desa untuk menjalankan peran dan kewenangan desa dalam intervensi gizi terintegrasi, memastikan tersedianya dan berfungsinya kader yang membantu pemerintah desa dalam pelaksanaan intervensi gizi terintegrasi di tingkat desa, meningkatkan sistem pengelolaan data *stunting* dan cakupan intervensi, melakukan pengukuran pertumbuhan dan perkembangan anak balita dan publikasi angka *stunting* dan melakukan review kinerja pelaksanaan program dan kegiatan terkait penurunan *stunting* secara periodik.

Adapun kendala dalam percepatan penurunan stunting meliputi sinkronisasi waktu dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan setiap organisasi perangkat daerah, belum terimplementasinya standar alokasi anggaran percepatan penurunan stunting yang signifikan, serta belum optimalnya manajemen akurasi dan kualitas data dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Rokan Hulu.

Kata Kunci: Lintas, Sektor, Konvergensi, Penurunan, Stunting

Abstract

After being designated as a locus of *stunting* in Riau Province in 2017, Rokan Hulu Regency took various policy steps. This effort was actualized by the local government's efforts to build collaborative synergy between regional government apparatus organizations in a *stunting* integrated. This study analyzes and describes the role of cross-sectors in the convergence of the acceleration of *stunting* reduction in Rokan Hulu district. The approach in this research is qualitative research in the form of field research by collecting primary and secondary data sources through in-depth interviews and document review.

The results showed that the Government of Rokan Hulu Regency made efforts to reduce *stunting* in a structured and comprehensive manner, such as identifying the distribution of *stunting*, conducting program availability, and constraints in implementing integrated nutrition interventions, developing activity plans to improve the implementation of integrated nutrition interventions, holding *stunting*, providing certainty. laws for villages to carry out village roles and authorities in integrated nutrition interventions, ensure the availability and functioning of cadres who assist village governments in implementing integrated nutrition interventions at the village level, improve *stunting* and intervention coverage, measure growth and development of children under five and publish rates *stunting* review the performance of programs and activities related to *stunting* periodically.

The obstacles in accelerating the reduction of *stunting* include time synchronization in the planning and implementation of the activities of each regional apparatus organization, the non-implementation of standard budget allocations for the significant acceleration of *stunting* reduction, and the not yet optimal management of accuracy and data quality in accelerating the reduction of *stunting* in Rokan Hulu Regency.

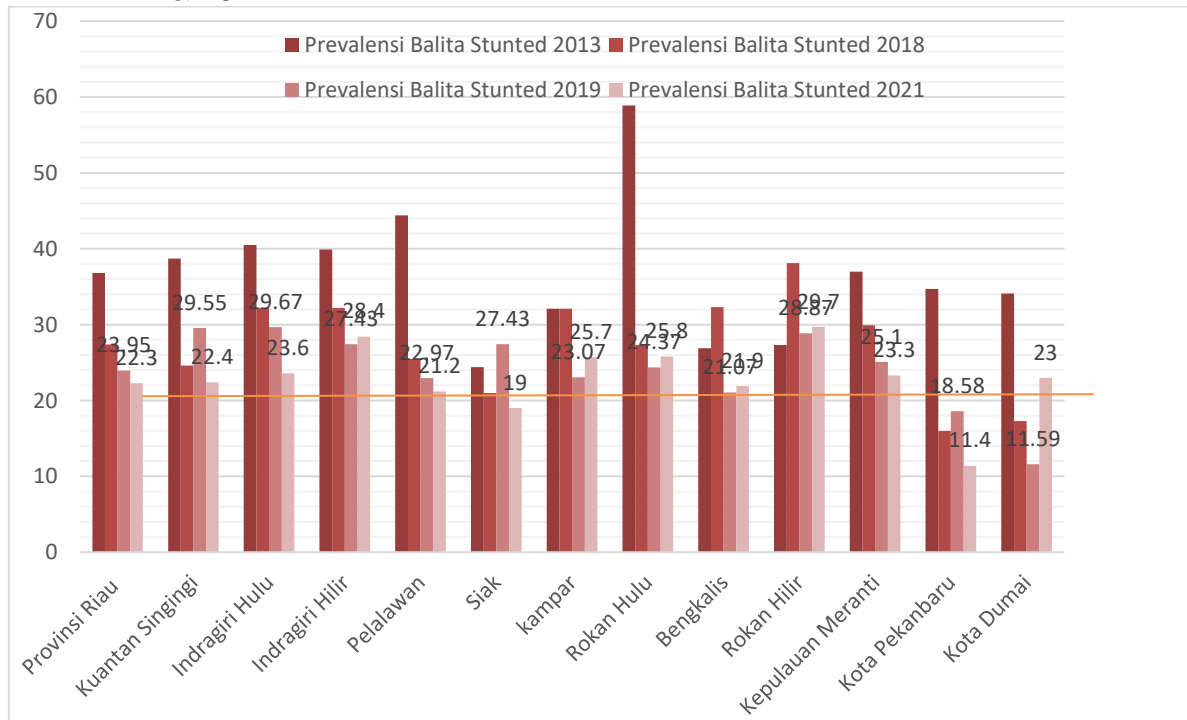
Keywords: Cross, Sector, Convergence, Decline, Stunting

PENDAHULUAN

Stunting masih menjadi masalah gizi dan kesehatan utama di Indonesia, termasuk di Provinsi Riau (Rahmawati dan Harahap 2022). Berdasarkan data riset kesehatan dasar (Riskesdas) Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Balitbang Kemenkes RI) menerangkan bahwa prevalensi *stunting* Provinsi Riau tahun 2013 sejumlah 36,8% dan Prevalensi *stunting* Provinsi Riau tahun 2018 sejumlah 27,4%. Menurut data Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2019 prevalensi *stunting* Provinsi Riau sejumlah 23,95% dan data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 menunjukkan Prevalensi *Stunting* Provinsi Riau tahun 2021 sejumlah 22,3% (Dinas Kesehatan Provinsi Riau 2021). Prevalensi

stunting di Provinsi Riau dari tahun ketahun mengalami penurunan namun masih terbilang cukup tinggi (Tursini et al. 2022).

Gambar 1. Grafik Prevalensi Balita Stunted Di Provinsi Riau Tahun 2013, 2018, 2019 & 2021



Sumber: Riskesdas (2013-2018), SSGBI (2019), SSGI (2021)

Untuk angka prevalensi stunting kabupaten dan kota di Provinsi Riau menurut data SSGBI tahun 2019 dan data SSGI Tahun 2021 menunjukkan ada peningkatan persentase prevalensi stunting tahun 2019 dengan persentase prevalensi stunting tahun 2021 pada 6 (enam) Kabupaten Kota, yakni Kabupaten Indragiri Hilir 27,43% menjadi 28,4%, Kabupaten Kampar 23,07% menjadi 25,7%, Kabupaten Rokan Hulu 24,37% menjadi 25,8%, Kabupaten Bengkalis 21,07% menjadi 21,9% Kabupaten Rokan Hilir 28,87% menjadi 29,7% dan Kota Dumai 11,59% menjadi 23%. Untuk target prevalensi stunting Provinsi Riau Tahun 2022-2024 menurut kabupaten/kota sudah ditetapkan melalui Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN-PASTI) yang telah disusun sebagai turunan dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021. Untuk mencapai target nasional 14% pada tahun 2024, target penurunan prevalensi stunting Provinsi Riau secara Nasional pada tahun 2024 ditetapkan sebesar 12,38%.

Tabel 1.Prevalensi Stunting Kabupaten/Kota Provinsi Riau 2013-2021

No	Kabupaten/Kota	Tahun			
		2013	2018	2019	2021
1	Kuantan Singingi	38,7	24,6	29,55	22,4
2	Indragiri Hulu	40,5	32,2	29,67	23,6
3	Indragiri Hilir	39,9	32,2	27,43	28,4
4	Pelalawan	44,4	25,5	22,97	21,2
5	Siak	24,4	21	27,43	19
6	Kampar	32,1	32,1	23,07	25,7
7	Rokan Hulu	58,9	27,3	24,37	25,8
8	Bengkalis	26,9	32,3	21,07	21,9
9	Rokan Hilir	27,3	38,1	28,87	29,7
10	Kepulauan Meranti	37	29,9	25,1	23,3
11	Kota Pekanbaru	34,7	16	18,58	11,4
12	Kota Dumai	34,1	17,3	11,59	23

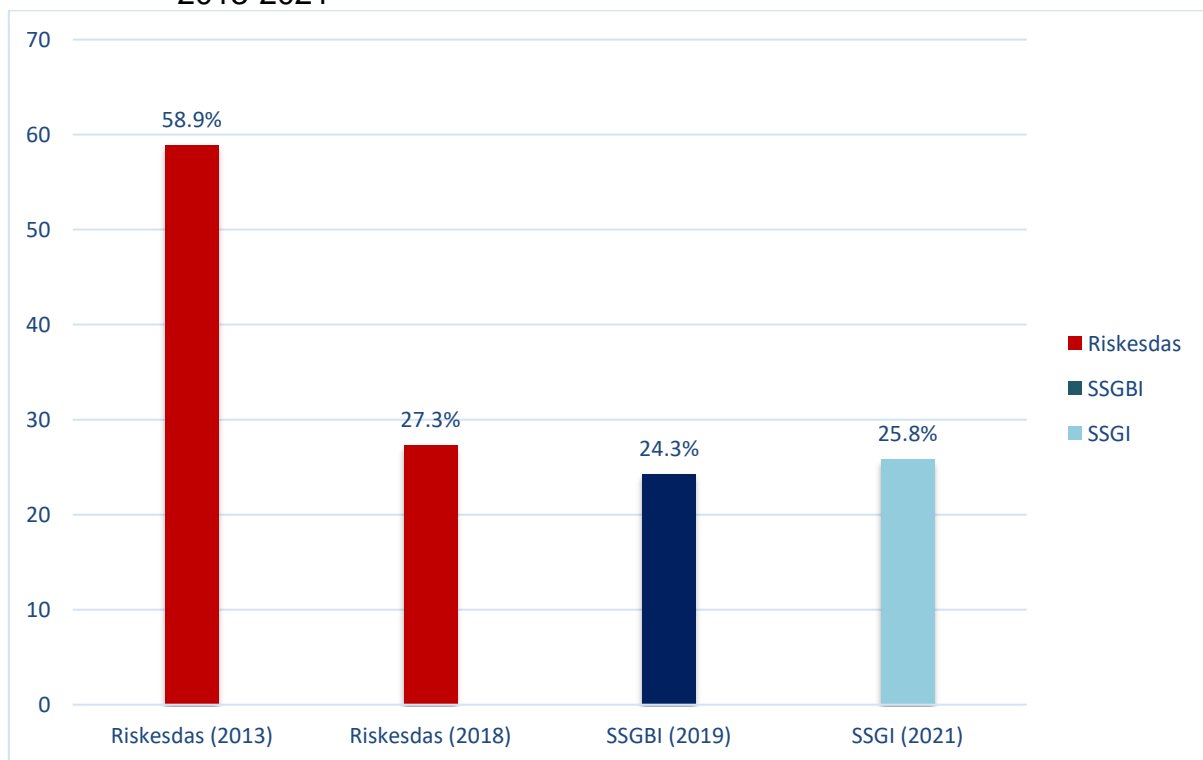
Sumber: Riskesdas (2013-2018), SSGBI (2019), SSGI (2021)

Penanganan penurunan *stunting* di Provinsi Riau sudah dimulai pada tahun 2018 pada 10 (sepuluh) desa lokus di Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya pada tahun 2019 ditetapkan 10 (sepuluh) lokus di Kabupaten Kampar. Sejak tahun 2019, Pemerintah Provinsi Riau mendorong penetapan kabupaten/kota sebagai fokus intervensi untuk melaksanakan aksi konvergensi. Penetapan desa fokus intervensi didasarkan pada analisis situasi cakupan layanan spesifik intervensi. Desa atau kecamatan dengan cakupan pelayanan rendah ditetapkan sebagai prioritas fokus intervensi dan jenis intervensi idealnya difokuskan pada indikator dengan cakupan rendah. Berdasarkan hasil analisis ruang lingkup layanan, 161 desa atau kelurahan ditetapkan sebagai wilayah fokus intervensi di sepuluh kabupaten/kota pada tahun 2021 (Rahmawati dan Harahap 2022). Adapun penetapan desa fokus intervensi untuk aksi konvergensi *stunting* berada di Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Bengkalis (Bappedaprov.riau.go.id 2021). Pada tahun 2017 Kabupaten Rokan Hulu ditetapkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Republik Indonesia sebagai kabupaten lokus *stunting* dari 100 kabupaten kota di Indonesia dan satu-satunya kabupaten di Provinsi Riau (TNP2K

2017). Menurut data Riskesdas tahun 2013 tingkat prevalensi *stunting* Kabupaten Rokan Hulu mencapai angka 58,9% dan merupakan angka tertinggi tingkat prevalensi *stunting* tahun 2013 dibandingkan jumlah persentase tingkat prevalensi *stunting* kabupaten kota lainnya di Provinsi Riau.

Berdasarkan data Riskesdas tahun 2018 tingkat prevalensi *stunting* Kabupaten Rokan Hulu sejumlah 27,3%, kemudian menurut data SSGBI tahun 2019 tingkat prevalensi *stunting* Kabupaten Rokan Hulu sejumlah 24,3%. Berdasarkan data SSGI tahun 2021 persentase prevalensi *stunting* Kabupaten Rokan Hulu meningkat menjadi 25,8%. Menurut data SSGBI tahun 2019 dan SSGI Tahun 2021 dari 6 (enam) Kabupaten Kota di Provinsi Riau yang mengalami peningkatan Prevalensi *Stunting* diantaranya adalah Kabupaten Rokan Hulu.

Gambar 2. Grafik Prevalensi *Stunting* Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Tahun 2013-2021

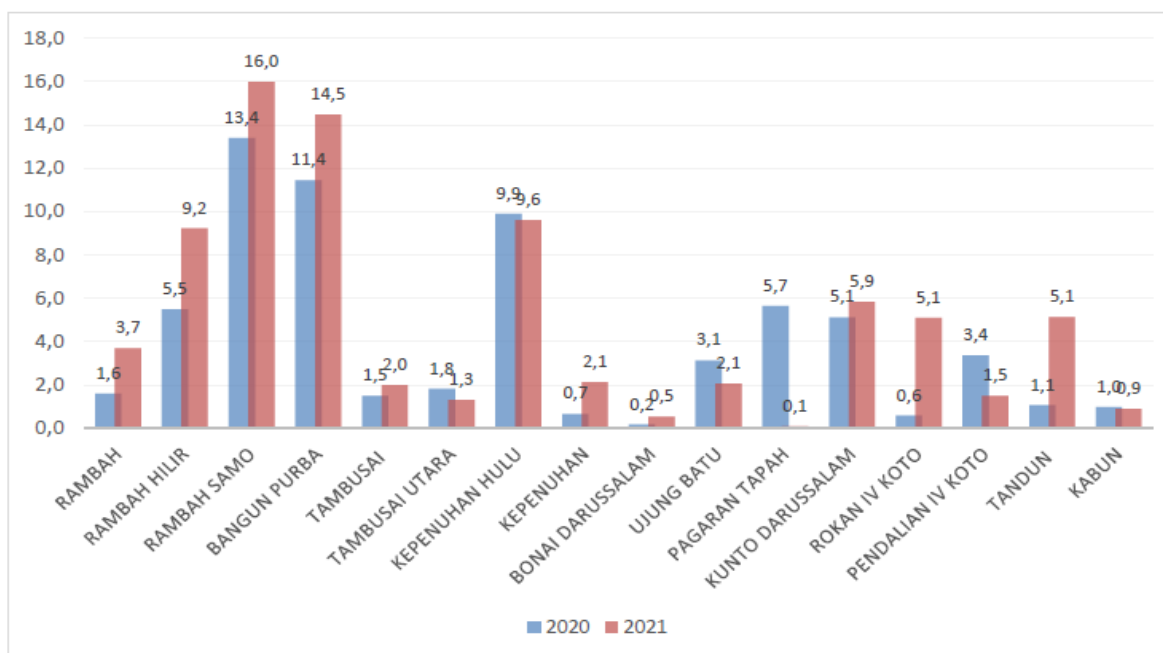


Sumber: Riskesdas (2013, 2018), SSGBI (2019), SSGI (2021)

Berdasarkan data elektronik Pencatatan Dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) Tahun 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu menggambarkan perkembangan bayi *stunting* pada bulan Agustus tahun 2020 dan tahun 2021 yakni peningkatan paling tinggi berada di Kecamatan Rokan IV Koto dari 0,6% menjadi 5,1%, dengan persentase mencapai 4,5% bila dibandingkan dengan

tahun sebelumnya. Sedangkan kecamatan yang mengalami penurunan stunting yang terbesar adalah Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam sebesar 5,6% dari 5,7 % menjadi 0,1 %.

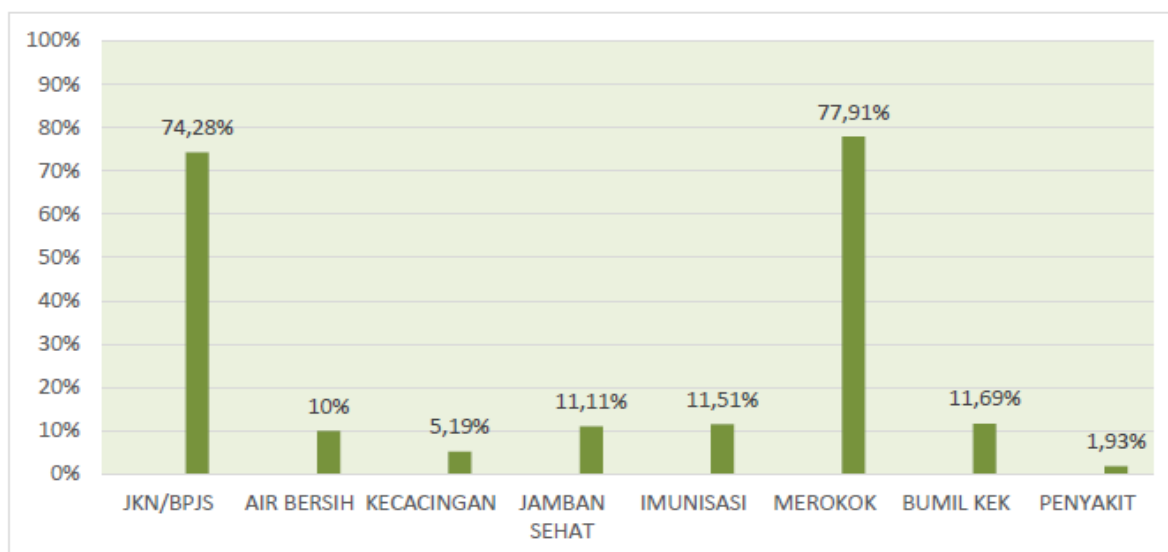
Gambar 3. Prevalensi Stunting Balita Berdasarkan kecamatan sekabupaten Rokan Hulu Tahun 2021



Sumber : e-PPGBM Tahun 2021, Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu

Angka harapan hidup masyarakat Kabupaten Rokan Hulu tahun 2019 mencapai 69,89 %, tahun 2020 mencapai 70,06%, tahun 2021 mencapai 70,18% dan tahun 2022 mencapai 70,51%. (Sumber: rohulkab.bps.go.id, 2022).

Gambar 4. Faktor Determinan terhadap Balita Stunting di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021



Sumber : e-PPGBM Tahun 2021, Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu

Menurut survey e-PPGBM Tahun 2021 oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu bahwa Faktor determinan terhadap balita stunting adalah jumlah anggota rumah tangga yang merokok, balita tidak memiliki jaminan kesehatan, balita belum imunisasi lengkap, balita tidak mempunyai jamban sehat dan balita tidak punya air bersih. Penanganan kesehatan masyarakat menjadi hal penting untuk diperhatikan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia kedepannya. Isu *stunting* saat ini menjadi isu nasional bahkan internasional karena berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia dimasa yang akan datang. Berangkat dari permasalahan tersebut maka penelitian ini mendeskripsikan Peran Lintas Sektor Dalam Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Rokan Hulu.

STUDI LITERATUR

Menurut definisi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bahwa makna Stunting merupakan bentuk kegagalan tumbuh kembang yang menyebabkan gangguan pertumbuhan linear pada balita akibat dari akumulasi ketidakcukupan nutrisi yang berlangsung lama, mulai dari masa kehamilan sampai usia 24 bulan (Sahroji, Hidayat, dan Nababan 2022). Kekurangan gizi pada masa tumbuh kembang anak di usia dini akan menghambat perkembangan fisik,

meningkatnya kesakitan, menghambat perkembangan mental anak, dan bahkan menyebabkan kematian. Balita yang mengalami masalah gizi stunting memiliki resiko terjadinya penurunan kemampuan intelektual, produktivitas, dan kemungkinan resiko mengalami penyakit degeneratif di masa mendatang (Sahroji, Hidayat, dan Nababan 2022).

Peran adalah perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang karena kewajibannya dari jabatan atau pekerjaannya. Menurut (Veithzal dan Mulyadi 2003) peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu. Peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa semakin tinggi kedudukan seseorang dalam suatu hierarki organisasi, semakin sedikit keterampilan teknis yang diperlukan. Sebaliknya, semakin rendah kedudukan seseorang dalam suatu hierarki organisasi, semakin penting keterampilan teknis yang diperlukan) (Siswanto 2021). Konsep konvergensi dapat diterapkan pada banyak kebijakan, institusi suatu politik, sebuah konstitusi, suatu preferensi politik, serta hasil kebijakan (Saputri 2019). Dilain hal, penyebab terjadinya konvergensi kemungkinan besar akan terjadi tidak hanya dipengaruhi oleh interaksi sukarela atau tidak sukarela dari para aktor negara di kancah internasional saja tetapi juga oleh kecenderungan daerah domestik untuk bertindak terhadap satu dorongan tetapi tidak ke yang lain. Ada dua faktor utama penyebab konvergensi yaitu: 1). Adanya mekanisme kausal yang memancing perubahan kebijakan di beberapa negara, dan 2). Keberadaan faktor-faktor lainnya yang dapat menaikkan efektivitas dari mekanisme kausal tersebut (Azalia 2017). Beberapa ahli teori menyampaikan kurang lebih ada 4 faktor utama yang membantu konvergensi, ialah adanya kompetisi, adanya pembelajaran, adanya kerja sama dan adanya respon umum terhadap sebuah goncangan (Schroder 2010).

Dalam mensukseskan kebijakan maka sangat membutuhkan koordinasi lintas sektoral guna keberhasilan pencapaian tujuan bersama (Syamsuadi et al. 2020). Kepemimpinan adalah kemampuan untuk memberikan pengaruh yang konstruktif kepada orang lain untuk melakukan usaha kooperatif mencapai tujuan yang sudah dicanangkan. Peran pemimpin di dalam koordinasi sangat penting guna membantu terwujudnya kesadaran tersebut (Hartati et al. 2022). Kemampuan seorang pemimpin

melakukan suatu hal, karena adanya level motivasional yang terkandung keinginan atau kemauan dan kemampuan seseorang untuk mendemonstrasikan kinerja efektif (Harbani 2007).

Kolaborasi adalah tindakan *joint-working* yang melibatkan berbagai aktor, individu, grup, atau organisasi yang bersama-sama berusaha mewujudkan tujuan tertentu. Kolaborasi merupakan serangkaian komponen-komponen yang berjalan membentuk suatu siklus, mempengaruhi satu sama lain, dan pada intinya adalah proses *collective decision-making*. Sebuah kolaborasi berhasil dilakukan tidak lepas dengan peran para stakeholder atau aktor di dalamnya. *Pentahelix* merupakan konsep yang berkembang dari *triple helix* dan *quadruple helix* (Rozikin 2019). Model *triple helix* (Leydesdorff 2012) melihat inovasi sebagai hasil dari jaringan kerja sama antara A-B-G (*academician-business-government*), dimana dunia akademik berperan sebagai pemasok *knowledge*, pihak industri sebagai lokus dari produksi menjadi pemanfaat *knowledge*, sementara pemerintah bertugas selaku fasilitator yang memungkinkan interaksi stabil antara pemasok dan pemanfaat *knowledge*. Komunikasi menjadi hal krusial dalam proses kolaborasi, karena adanya orientasi pembentukan konsensus. Komunikasi seringkali terbentuk melalui diskusi langsung (tatap muka). Komunikasi yang terbuka selanjutnya mempengaruhi pembentukan kepercayaan antar aktor. Membangun kepercayaan merupakan syarat untuk membangun kolaborasi yang solid. Membangun kepercayaan adalah proses yang memakan waktu dan membutuhkan komitmen jangka panjang. Komitmen merupakan komponen penting sekaligus tantangan utama dalam proses kolaborasi. Komitmen dipengaruhi oleh komponen sebelumnya (membangun kepercayaan) (Stefani dan Suardi 2014).

Sedangkan faktor (di dalam komponen) yang mempengaruhi adalah adanya *mutual recognition* (mengenal bersama yang bersifat mutual) dan *join tap preciation* (apresiasi bersama) antar aktor. Selain itu, adanya *ownership the process* (rasa memiliki pada proses) yang diwujudkan dengan adanya pengaruh setiap aktor dalam memberi keputusan merupakan pendorong komitmen, namun memiliki dilema, karena adanya perbedaan dan kompleksitas dalam kolaborasi (Suprpto 2009). Adanya pemahaman bersama merupakan syarat yang diperlukan selama proses kolaborasi, sehingga tujuan bersama dapat terwujud. Pemahaman yang dimaksud adalah

penyatuan tujuan, mendefinisikan permasalahan secara bersama, sehingga meminimalisir terjadinya saling tidak mengerti atau kesalahpahaman. Dampak positif diharapkan sebagai pendorong serta menjaga agar kolaborasi tetap berada pada jalurnya. Upaya penanggulangan stunting telah dilakukan oleh berbagai pihak termasuk dengan melakukan agenda kerjasama dengan perguruan tinggi. Ada beberapa penelitian sejenis dalam pencegahan dan penanggulangan stunting yang relevan dengan penelitian ini, misalnya penelitian yang dilakukan oleh (Permanasari et al. 2020) dengan kajian tantangan implementasi konvergensi pada program pencegahan stunting di kabupaten prioritas. Adapun temuan penelitiannya terkait implementasi konvergensi ialah antara lain masih adanya ego sektoral pada masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) dan belum optimalnya sosialisasi sehingga banyak yang belum memahami secara menyeluruh terkait program pencegahan stunting selain itu informasi yang terlambat, terputusnya informasi dari sosialisasi, serta kondisi demografi wilayah yang sulit menjadi salah satu penyebab pada beberapa daerah tertentu terhadap terhambatnya sosialisasi. Implementasi konvergensi yang belum optimal juga disebabkan belum adanya petunjuk pelaksanaan dan teknis dalam melaksanakan program, sehingga daerah mengalami disinformasi dalam melaksanakan kegiatan tersebut.

Penelitian lainnya tentang intervensi penanganan stunting dilakukan oleh (Tampubolon 2020) dengan kajian kebijakan intervensi penanganan stunting terintegrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah secara terstruktur mulai dari pemerintah pusat dan daerah telah melakukan berbagai upaya intervensi terhadap stunting. Pemerintah Daerah belum memasukkan stunting sebagai indikator capaian kinerja kesehatan. Dinas Kesehatan telah mengerjakan beberapa program dan kegiatan yang berkaitan dengan intervensi stunting. Target pencapaian kinerja dinas kesehatan baru sebatas laporan administratif saja. Walaupun demikian Pemerintah pusat telah mengalokasikan dana transfer khusus melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2018 dan 2019. Belum ditemukan adanya koordinasi lintas sektor sehingga program dan kegiatan yang ada berjalan masing-masing dengan sasaran yang berbeda.

Penelitian (M. Iqbal dan Yusran 2021) mengkaji upaya konvergensi kebijakan pencegahan stunting di Kota Padang. Hasil penelitian menunjukkan aksi konvergensi

kebijakan pencegahan stunting tidak berjalan sesuai dengan tahapan konvergensi. Mulai dari tahap perencanaan, pemerintah Kota Padang belum memiliki peraturan khusus untuk pencegahan stunting. Tahap implementasi, selama ini terfokus pada pelaksanaan intervensi gizi spesifik saja sedangkan intervensi gizi sensitif berjalan secara sendiri-sendiri. Tahap evaluasi, OPD dilingkungan pemerintah Kota Padang selama ini melaksanakan evaluasi berdasarkan Kelompok Kerja (PokJa) masing-masing tidak khusus untuk stunting.

Penelitian lain terkait pencegahan stunting dilakukan oleh (Sunaryo dan Arifianti 2022) dengan fokus kajian implementasi kebijakan percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting di Kabupaten Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting tidak berhasil dalam menurunkan kasus stunting di Kabupaten Bandung walaupun kegiatan-kegiatan pencegahan dan penanggulangan stunting telah dilaksanakan, baik intervensi gizi sensitif maupun spesifik dikarenakan pandemi Covid-19. Penelitian terkait stunting juga dilakukan oleh (Sahroji, Hidayat, dan Nababan 2022) dengan fokus kajian implementasi kebijakan Dinas Kesehatan Dalam Penanganan Stunting Di Kabupaten Karawang.

Hasil dari penelitian ini implementasi kebijakan Dinas Kesehatan dalam penanganan stunting di Kabupaten Karawang dapat dikatakan belum optimal, dikarenakan masih terdapat program-program yang memang belum terlaksana dan kurang memberikan efek dampak langsung kepada masyarakat Kabupaten Karawang. Saran yang peneliti berikan untuk program penurunan angka stunting ini diharapkan dapat meningkatkan mutu dan kualitas Dinas Kesehatan dalam menangani stunting di Kabupaten Karawang yang sebelumnya sudah baik menjadi sangat baik (Sahroji, Hidayat, dan Nababan 2022).

Mengingat problematika Kabupaten Rokan Hulu sebagai salah satu lokus dari 100 kabupaten kota prioritas untuk intervensi anak kerdil (stunting) oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) tahun 2017 dan juga berkenaan implementasi kebijakan konvergensi stunting terhadap Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) melalui berbagai program pemerintah dan relevansinya dengan beberapa penelitian terdahulu, maka penelitian ini secara komprehensif difokuskan pada peran lintas

sektor dan stakeholder dalam konvergensi penurunan stunting di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif. Menurut Creswell dalam melakukan analisis penelitian kualitatif diperlukan beberapa langkah yaitu: pertama, mempersiapkan data yang akan digunakan; kedua, membaca secara keseluruhan seluruh data yang telah dikumpulkan; ketiga, mengolah data untuk dibagi menjadi bagian-bagian yang akan dideskripsikan; keempat, mengaitkan seluruh hasil pembagian untuk kemudian dideskripsikan; kelima, menyajikan deskripsi dalam laporan kualitatif, dan keenam, menginterpretasikan makna dari data yang sudah disajikan (Creswell 2014). Bentuk dari penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan)(Simanjuntak dan Sosrodiharjo 2014) yang juga dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari sumber data yang berhubungan dengan penelitian ini guna melengkapi data terkait Peran Lintas Sektor Dalam Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Rokan Hulu. sumber data dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer bersumber dari informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Bentuk data primer ini diantaranya catatan hasil wawancara, hasil observasi lapangan dan data-data mengenai informan (Iqbal, Hasan 2002).

Subjek penelitian yang diwawancarai adalah stakeholder pemerintah daerah, akademisi, masyarakat di kawasan lokus dan Korporasi terkait dalam upaya konvergensi percepatan penurunan Stunting di Kabupaten Rokan Hulu. Hasil wawancara akan lebih dapat dipercaya ketika didukung oleh dokumentasi. Dokumentasi ini didapat melalui data yang dikumpulkan dari surat, memorandum, pengumuman resmi, agenda, berita acara rapat, hasil seminar atau simposium, dokumen-dokumen administratif, penelitian-penelitian atau evaluasi-evaluasi resmi pada situs, kliping-kliping baru, dan artikel-artikel lain di media massa. Metode analisis yang diterapkan dalam kajian ini adalah metode analisis kualitatif deskriptif. Data

penelitian kualitatif diperoleh dari berbagai sumber, yakni dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi) dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Setelah data terkumpul peneliti melakukan uji validitas dan reliabilitas data sebelum dilakukan analisis terhadap data yang ada.

PEMBAHASAN

Peran Lintas Sektor Dalam Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Rokan Hulu

Konvergensi merupakan sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu, dan bersama-sama kepada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas untuk mencegah stunting. Pencegahan stunting akan berhasil apabila kelompok sasaran prioritas mendapatkan layanan secara simultan. Oleh karena itu, konvergensi perlu segera dilakukan untuk mempercepat upaya pencegahan stunting. Konvergensi layanan intervensi pencegahan stunting membutuhkan keterpaduan proses perencanaan, penganggaran, dan pemantauan program pemerintah secara lintas sektor untuk memastikan tersedianya setiap layanan intervensi kepada rumah tangga 1.000 HPK. Proses konvergensi membutuhkan pendekatan perubahan perilaku lintas sektor agar layanan-layanan tersebut digunakan oleh sasaran rumah tangga 1.000 HPK.

Untuk melihat Peran Lintas Sektor Dalam Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Rokan Hulu pembahasan merujuk pada Aksi Konvergensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting terintegrasi sesuai dengan Petunjuk Teknis Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Kabupaten/Kota yang dikeluarkan oleh Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2018.

1. Melakukan Identifikasi Sebaran Stunting, Ketersediaan Program, Dan Kendala Dalam Pelaksanaan Integrasi Intervensi Gizi di Kabupaten Rokan Hulu

Implementasi kebijakan pemerintah dalam pencegahan stunting baik intervensi gizi sensitif maupun intervensi gizi spesifik telah dilaksanakan mulai dari tingkat pusat,

provinsi sampai tingkat desa. Untuk penetapan desa lokus stunting Kabupaten Rokan Hulu tahun 2023 ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Rokan Hulu sebagai berikut:

Tabel 2: Desa Lokus Stunting Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

Desa/Kelurahan	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting	Jumlah Anak Stunting (Pendek & Sangat Pendek)	% Prevalensi Stunting
Rambah Samo Barat	427	62	16.71
Rambah Utama	334	17	6.69
Karya Mulya	320	26	14.44
Teluk Aur	294	46	17.69
Rambah Muda	309	53	17.79
Rambah	478	56	6.67
Muara Musu	296	22	10.19
Pekan Tebih	287	27	12.98
Muara Jaya	387	24	6.25
Kepenuhan Jaya	355	15	8.62
Cipang Kiri Hulu	372	17	7.56
Muara Dilam	307	35	8.27
Kota Raya	342	29	7.59
Tandun	681	21	11.67
Kumain	248	24	22.22
Puo Raya	268	24	18.18

Sumber: Bupati Rokan Hulu No. SK. Kpts.476/DPPKB/372/2022

Penetapan desa Lokus Stunting didasarkan pada jumlah keluarga berisiko stunting dan jumlah bayi stunting di wilayah dengan TB/U stuntednya tinggi dan cakupan layanan intervensinya rendah. Pada desa lokus stunting dilakukan intervensi sensitif dan spesifik. Penyebab stunting umumnya tidak berdiri sendiri, tetapi kombinasi dari beberapa penyebab stunting. Untuk mengidentifikasi sebaran stunting Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dilakukan melalui Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DPP-KB) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa (DPMPD) dengan melakukan pendataan kepada masyarakat dengan tujuan untuk melihat sebaran stunting di

Kabupaten Rokan Hulu yakni untuk mendapatkan data terkait cakupan dan keterpaduan intervensi gizi pada rumah tangga 1000 HPK.

Adapun Program dari dinas kesehatan Kabupaten Rokan Hulu yakni menyoar kepada remaja putri di sekolah-sekolah seperti memberikan sosialisasi pemahaman parenting usia remaja Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA), gerakan minum multivitamin serentak (Germitak) dalam pencegahan anemia serta edukasi kesehatan bagi siswa dan siswi SMP dan SMA sebagai upaya pencegahan stunting sejak dini. Selain program tersebut hal lain yang juga sangat penting adalah dukungan layanan (Supra Desa) terhadap pelayanan KIA, PAUD, Air Bersih & Sanitasi, dan Jaminan Kesehatan. Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu dalam upaya penurunan stunting tahun 2022 dilakukan beberapa kegiatan seperti Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat, Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir dan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita.

Tabel 3: Implementasi Cakupan Interevensi Layanan Gizi Spesifik dan Sensistif di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022

No.	29 Cakupan Layanan Gizi Sensitif dan Spesifik Stunting di Kabupaten Rokan Hulu
1	Remaja Putri Konsumsi Tablet tambah darah
2	Remaja putri menerima pemeriksaan status anemia
3	Calon pengantin Konsumsi Tablet Tambah darah
4	Pemeriksaan kesehatan calon PUS
5	Calon PUS menerima pendampingan kesehatan Produksi
6	Calon pengantin mendapatkan bimbingan perkawinan
7	PUS Menerima bantuan Tunai Bersyarat
8	PUS Penerima BNPT
9	PUS Penerima bantuan jaminan kesehatan
10	Ibu hamil mendapatkan bantuan asupan gizi
11	Ibu Hamil mendapatkan Tablet Tambah darah minimal 90 Tablet
12	Persentase Unmet Need pelayanan KB
13	data Persentase kehamilan yang tidak diinginkan
14	Bayi mendapatkan ASI Eksklusif
15	Anak Mendapatkan MPASI
16	Balita Gizi buruk mendapatkan tatalaksana Gizi buruk
17	Balita dipantau pertumbuhan dan perkembangannya.
18	Balita kurang gizi mendapatkan asupan gizi
19	Balita mendapatkan Imunisasi dasar lengkap

20	Keluarga yang STOP BABS
21	Keluarga yang melaksanakan PHBS
22	Keluarga Resiko Stunting mendapatkan promosi Konsumsi Ikan
23	Pelayanan KB pasca persalinan
24	Keluarga beresiko stunting memperoleh pendampingan
25	Keluarga beresiko stunting memperoleh manfaat pekarangan
26	Rumah tangga mendapatkan akses Air minum yang layak
27	Rumah tangga mendapatkan akses sanitasi yang layak
28	KPM PKH mengikuti P2k2
29	KPM Ibu Hamil dan Ibu Menyusui menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Rokan Hulu, 2022

2. Menyusun Rencana Kegiatan Untuk Meningkatkan Pelaksanaan Integrasi Intervensi Gizi di Kabupaten Rokan Hulu

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah penggunaan seluruh sumber daya yang ada harus di pergunakan secara efektif dan efisien hal ini bertujuan untuk peningkatan hasil kerja atau kinerja khususnya di badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu, sumber daya yang ada di lingkungan Bappeda Kabupaten Rokan Hulu antara lain :

1. Sumber Daya Manusia (SDM),
2. Sumber daya pendukung lainnya dan
3. Sumber daya keuangan.

Adapun penyusunan rencana kegiatan pelaksanaan intervensi gizi dalam rangka penurunan stunting yang dilakukan pemerintah daerah yakni melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Rokan Hulu dimana BAPPEDA menyusun rencana berdasarkan kalender perencanaan dan penganggaran daerah. Bappeda Kabupaten Rokan Hulu memasukkan perencanaan program pada isu strategis peningkatan kualitas sumber daya manusia. Bappeda melakukan Analisis situasi melalui forum musrenbang desa, musrenbang kecamatan, penyusunan Rencana Kerja pemerintah Daerah (RKPD) dan melakukan rancangan awal RKPD.

Dipilihnya Bappeda sebagai *leading* sektor dan koordinator dalam konvergensi ini dilatarbelakangi karena posisi dari Bappeda sebagai perencana dan pengarah dalam menjalankan proses pemerintahan di daerahnya masing-masing. Untuk penganggaran daerah yang tercermin dari Perubahan Ketiga

Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hulu No 51 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rokan Hulu tahun 2022 bahwa di dalam kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu dianggarkan dengan nominal sejumlah Rp.112.236.400 hal tersebut meningkat tiga kali lipat dari rincian anggaran kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu pada penganggaran tahun sebelumnya yang hanya berjumlah Rp. 31.500.000 yang dituangkan ke dalam Perbup Rokan Hulu No. 68 Tahun 2020 tentang penjabaran APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021.

Upaya komitmen tersebut juga mendapat respon dan perhatian dari pemerintah pusat melalui transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) pada APBD Kabupaten Rokan Hulu tahun 2022 perolehan DAK tersebut diberikan pada bidang keluarga berencana DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB Penugasan Penurunan Stunting dengan nominal pendanaan sejumlah Rp. 279.960.000. *Tagging* anggaran kegiatan Intervensi sensitif dan Spesifik Penanganan Stunting didalam APBD (2021, 2022)-RKPD (2023) Kabupten Rokan Hulu yang disampaikan dalam pelaporan TPPS Kabupaten Rokan Hulu Kepada TPPS Provinsi Riau pada Bulan Mei Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4: *Tagging* Anggaran Kegiatan Intervensi Sensitif dan Spesifik Penanganan Stunting pada APBD (2021, 2022)-RKPD (2023)

No	Tahun	Pagu Anggaran
1	2021	Rp. 5.594.392.980,00
2	2022	Rp. 20.228.912.643
3	2023	Rp. 32.948.479.030,00

Sumber: APBD dan RKPD Kab. Rokan Hulu 2022.

Bappeda juga dinilai dapat menemukan jalan untuk memudahkan berkoordinasi antar lembaga-lembaga pemerintahan yang dinaunginya. Peran Bappeda, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten, dalam proses pelaksanaan konvergensi program percepatan penurunan stunting sejatinya melakukan koordinasi, pengawasan, dan monitoring. Dalam hal penyediaan program Integrasi Intervensi Gizi tidak hanya dilakukan oleh dinas kesehatan dan DPPKB saja

namun juga melibatkan dinas-dinas lainnya seperti Dinas PU Cipta Karya, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura dan Dinas Perikanan

3. Menyelenggarakan Rembuk Stunting di Kabupaten Rokan Hulu

Kabupaten Rokan Hulu melaksanakan kegiatan Rembuk Stunting melalui BAPPEDA dan Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu yakni melakukan rancangan rencana kegiatan penurunan stunting terintegrasi dan memastikan terjadinya pelaksanaan intervensi penurunan stunting secara bersama-sama seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu antara lain Kepala Daerah, DPRD, Instansi vertikal, OPD, lembaga pemerintah lainnya, lembaga non pemerintah, perusahaan, akademisi, organisasi profesi, dan masyarakat terutama di lokasi prioritas (lokus penanganan). Peran swasta dalam hal ini dapat dilihat dari bantuan dana CSR yang diberikan kepada masyarakat melalui program pendidikan dan kesehatan (Trisnawati et al. 2021). Untuk tahun 2021 dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk program stunting Kabupaten Rokan Hulu berasal dari perusahaan kelapa sawit yakni PT. Forgius Agro Asia , PT. Rohul Sawit Lestari, PT Langgak Inti Lestari, PT. Giga Putra Perkasa dan PT Sawit Asahan Indah dengan total jumlah dana CSR Rp.1.652.105.000 (Bappeda Rokan Hulu, 2022) Kemudian partisipasi dari perguruan tinggi dalam bentuk kerjasama program pengentasan kemiskinan dilakukan dengan berbagai perguruan tinggi. Adapun tujuan agenda Rembuk Stunting Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 antara lain sebagai berikut:

1. Menyampaikan hasil analisis situasi berupa Desa Lokus Stunting Tahun 2022 dan rancangan rencana kegiatan intervensi penurunan stunting kab/kota terintegrasi.
2. Mendeklarasikan komitmen pemerintah daerah dan menyepakati rencana kegiatan intervensi penurunan stunting terintegrasi.
3. Membangun komitmen publik dalam kegiatan pencegahan dan penurunan stunting secara terintegrasi di Kabupaten Rokan Hulu
4. Komitmen Diseminasi Informasi Dalam Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting di Kabupaten Rokan Hulu yang ditandatangani oleh Bapak Bupati Rokan Hulu, Kepala Bappeda, Kepala DPMPD, Kepala Diskominfo,

Kepala Kemenag, Ketua MUI, Ketua MDI, dan Camat serta Kepala Desa Lokus Stunting.

5. Komitmen Desa Dalam Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting di Kabupaten Rokan Hulu yang ditandatangani oleh Bapak Bupati Rokan Hulu, Kepala Bappeda, Kepala DPMPD, Tenaga Ahli P3MD, Camat serta Kepala Desa Lokus Stunting.
6. Komitmen Penerapan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) Dalam Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting di Kabupaten Rokan Hulu yang ditandatangani oleh Bupati Rokan Hulu, Bunda PAUD Rokan Hulu, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Koordinator Fasilitator PAUD HI, Camat serta Kepala Desa di wilayah Lokus Stunting.
7. Rekapitulasi Program / Kegiatan Tahun 2022 yang terkait dengan Intervensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting terintegrasi.

Rancangan rencana kegiatan penurunan stunting terintegrasi dan memastikan terjadinya pelaksanaan intervensi penurunan stunting secara bersama-sama seluruh komponen seperti pemerintah, swasta, masyarakat, perguruan tinggi, dan media.

4. Memberikan Kepastian Hukum Bagi Desa Untuk Menjalankan Peran Dan Kewenangan Desa Dalam Intervensi Gizi Terintegrasi di Kabupaten Rokan Hulu

Selaras dengan amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa) pada pasal 68 ayat 2 bahwa masyarakat berkewajiban untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat termasuk pemerintah Desa merupakan ujung tombak keberhasilan upaya pencegahan stunting di Desa yang secara langsung akan berdampak pada penanggulangan kemiskinan, dikarenakan rumah tangga miskin yang paling rentan terhadap permasalahan stunting. Masyarakat harus ditingkatkan peran dan kapasitasnya dalam melakukan fungsi-fungsi fasilitasi (pendataan dan pemantauan) dan advokasi (koordinasi, konvergensi dan regulasi) pencegahan stunting di Desa.

Dalam melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting serta untuk memberikan kepastian hukum bagi desa untuk menjalankan peran dan kewenangan desa dalam intervensi gizi

terintegrasi di Kabupaten Rokan Hulu maka Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu merespon dengan menyusun dan menetapkan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 2 tahun 2021 Tentang Peran Desa Dalam Konvergensi Pencegahan Stunting Terintegrasi. Tujuan utama dari diterbitkannya kewenangan desa dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi adalah untuk memberikan kepastian hukum yang dapat digunakan sebagai rujukan bagi desa dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung upaya pencegahan dan penurunan stunting.

Tabel 5. Peran Desa Dalam Penurunan Stunting Di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021

Kegiatan	Anggaran Kegiatan (Rp)	Total (Rp)
Honor Kader Posyandu, Kader Pembangunan Manusia (KPM)	Rp.5,497,470,221	Rp.22.137.866.654
Sanitasi	Rp.2,686,461,376	
Air bersih	Rp.1,879,085,550	
MCK/Toliet	Rp.2,039,095,509	
Sosialisasi Stunting	Rp.54,690,200	
Pembangunan/rehap Posyandu	Rp.1,155,214,478	
Pembangunan/Rehap PAUD	Rp.1,706,645,200	
Honor Guru PAUD	Rp.1,895,955,760	
Operasional PAUD	Rp.274,443,250	
Tanaman pekarangan untuk gizi, obat dsbnya	Rp.179,466,185	
Program PAUD Holistik	Rp.156,930,000	
Inovasi konvergensi stunting	Rp.121,865,000	
Sosialisasi ODF	Rp.33,400,000	
Penyuluhan Stunting	Rp.75,514,200	
pemberian susu ibu hamil dan dacin	Rp.100,000,000	
Pemberian Tablet Tambah darah	Rp.2,000,000	

Sumber: Laporan Paparan Kinerja TPPS Kab. Rohul tahun 2021, 2022.

Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 2 tahun 2021 Tentang Peran Desa Dalam Konvergensi Pencegahan Stunting Terintegrasi dapat menjadi dasar untuk:

1. Menetapkan kewenangan desa dalam mendukung intervensi gizi terintegrasi dalam pencegahan dan penurunan stunting,

2. Meningkatkan alokasi penggunaan APBDes terutama penggunaan Dana Desa untuk kegiatan yang dapat mendukung pencegahan dan penurunan stunting,
3. Menyediakan, memobilisasi, melatih, dan mendanai kegiatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) agar dapat memfasilitasi pelaksanaan intervensi gizi terintegrasi dalam pencegahan dan penurunan stunting di tingkat desa,
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penyediaan layanan pencegahan dan penurunan stunting termasuk pelaksanaan kegiatan perubahan perilaku dan konseling individu/pribadi,
5. Memastikan perencanaan dan penganggaran program/kegiatan pencegahan dan penurunan stunting di tingkat desa, dan
6. Meningkatkan peran serta masyarakat untuk memanfaatkan layanan penurunan stunting

Menurut pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 Peran Desa Dalam Konvergensi Pencegahan Stunting Terintegrasi bahwa Perencanaan konvergensi pencegahan stunting di Desa dirumuskan sebagai bagian dari perencanaan pembangunan jangka menengah Desa yang terintegrasi dengan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah. Dalam hal pemerintah Desa tidak memprioritaskan stunting, Kepala Desa harus mengkaji ulang visi misi yang terjabarkan dalam arah kebijakan perencanaan pembangunan Desa sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Oleh karena itu, desa diharapkan untuk menyusun kegiatan-kegiatan yang relevan dengan upaya pencegahan dan penurunan stunting terutama dalam skala desa melalui Pemerintahan Desa.

5. Memastikan Tersedianya Dan Berfungsinya Kader Yang Membantu Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Intervensi Gizi Terintegrasi Di Tingkat Desa di Kabupaten Rokan Hulu

Pemerintah Desa mengangkat Kader Pembangunan Manusia (KPM) melalui SK. Kepala Desa dengan Tugas Pokok adalah memfasilitasi pemerintah dan masyarakat desa dalam pencegahan dan penurunan stunting. KPM adalah warga masyarakat Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa untuk bekerja membantu pemerintah Desa dalam memfasilitasi masyarakat Desa dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan sumber daya manusia di Desa. Hal tersebut sesuai

dengan ketentuan BAB VI pasal 24 Perbup No.02 Kabupaten Rokan Hulu tahun 2021. Kriteria KPM adalah sebagai berikut:

- a. berasal dari warga masyarakat desa setempat;
- b. berpengalaman sebagai kader masyarakat diutamakan bidang pembangunan manusia seperti Kader Posyandu, Guru PAUD, dan kader kesehatan lainnya;
- c. memiliki kemampuan komunikasi yang baik, khususnya dapat berbahasa daerah setempat;
- d. pendidikan minimal SLTP.

Adapun tugas KPM diantaranya sebagai berikut:

- a. mensosialisasikan kebijakan konvergensi pencegahan stunting di Desa kepada masyarakat di Desa, termasuk memperkenalkan tika pertumbuhan untuk pengukuran panjang/tinggi badan baduta sebagai alat deteksi dini stunting;
- b. mendata sasaran rumah tangga 1.000 HPK;
- c. memantau pelayanan pencegahan stunting terhadap sasaran rumah tangga 1.000 HPK untuk memastikan setiap sasaran pencegahan stunting mendapatkan pelayanan yang berkualitas;
- d. memfasilitasi dan mengadvokasi peningkatan belanja APBDes utamanya yang bersumber dari Dana Desa, untuk digunakan membiayai kegiatan pencegahan stunting berupa layanan intervensi gizi spesifik dan sensitife;
- e. memfasilitasi suami ibu hamil dan bapak dari anak usia 0-23 bulan untuk mengikuti kegiatan konseling gizi serta kesehatan ibu dan anak;
- f. memfasilitasi masyarakat Desa untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan pembangunan Desa untuk pemenuhan pelayanan gizi spesifik dan sensitif;
- g. melaksanakan koordinasi dan/atau kerjasama dengan para pihak yang berperan serta dalam pelayanan pencegahan stunting, seperti bidan Desa, petugas puskesmas (ahli gizi, sanitarian), guru PAUD dan/atau perangkat Desa.

Aplikasi e-HDW mempermudah Kader Pembangunan Manusia (KPM) dalam memfasilitasi konvergensi pencegahan stunting di Desa, khususnya berkaitan dengan kegiatan pengumpulan data, pemantauan, pencatatan dan pelaporan penerimaan rumah tangga 1.000 HPK. Menciptakan lebih banyak waktu bagi KPM untuk lebih banyak melakukan advokasi masyarakat mempermudah masyarakat dan Pemerintah

Desa dalam menyusun usulan tentang kegiatan pencegahan stunting di Desa. Memudahkan pemerintah pusat dan daerah dalam memantau kemajuan tingkat konvergensi pencegahan stunting 1.000 HPK di tingkat Desa secara riil dan ter-update.

Tabel 6. Desa di Kabupaten Rokan Hulu yang telah menerbitkan SK. Penunjukan Kader Pembangunan Manusia (KPM)

No	Desa	tanggal SK	Jumlah KPM
1	Desa Pasir Agung	01 Januari 2019	1
2	Desa Pasir Intan	20 Juni 2019	1
3	Desa Rambah Jaya	13 Januari 2019	1
4	Desa Bangun Purba	04 Januari 2021	1
5	Desa Bangun Purba Barat	26 Juni 2019	1
6	Desa Bangun Purba Timur Jaya	05 Januari 2021	1
7	Desa Tangun	03 Juni 2019	1
8	Desa Tambusai Utara	21 Juni 2019	1
9	Desa Mahato	21 Juni 2019	1
10	Desa Bangun Jaya	21 Juni 2019	1
11	Dst . 11 s/d 139	21 Juni 2019	1

Sumber: DPMPD Kab. Rokan Hulu, 2022

Selain KPM ada juga Rumah Desa Sehat (RDS) (1) RDS merupakan *social riat* bersama pegiat pemberdayaan masyarakat Desa dan pelaku pembangunan Desa. Pegiat pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada adalah Kader Posyandu, guru PAUD, kader kesehatan, unit layanan kesehatan, unit layanan pendidikan, kader PKK, Karang Taruna, tokoh masyarakat, dan berbagai kelompok masyarakat yang peduli dalam upaya pencegahan stunting. RDS mempunyai fungsi sebagai :

- a. Pusat informasi pelayanan sosial dasar di Desa khususnya bidang kesehatan;
- b. Ruang literasi kesehatan di Desa.
- c. Wahana komunikasi, informasi dan edukasi tentang kesehatan di Desa;
- d. Forum advokasi kebijakan pembangunan Desa di bidang kesehatan; dan
- e. Pusat pembentukan dan pengembangan kader pembangunan masyarakat.

6. Meningkatkan Sistem Pengelolaan Data Stunting Dan Cakupan Intervensi di Kabupaten Rokan Hulu

Sistem manajemen pengelolaan data stunting dan cakupan intervensi diperlukan untuk melihat rencana kegiatan penanggulangan stunting oleh BAPPEDA Kabupaten Rokan Hulu. Hal tersebut dilakukan dengan kegiatan perbaikan sistem data yang bersumber dari berbagai kesenjangan data pada hasil analisis pendataan stunting di Kabupaten Rokan Hulu.

Persoalan data menjadi hal esensial dalam upaya penanggulangan stunting. Selain itu pengelolaan data stunting dan cakupan intervensi dilakukan sebagai upaya perbaikan data peningkatan sistem yang ditujukan untuk acuan pemantauan pelaksanaan kegiatan konvergensi percepatan penurunan stunting serta sebagai masukan dalam review kinerja tahunan pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu. Persoalan utama dari Kondisi data Prevalensi Stunting Desa di Kabupaten Rokan Hulu masih mengalami beberapa kendala kualitas data seperti jaringan internet, validitas data dan tidak updated.

7. Melakukan Pengukuran Pertumbuhan Dan Perkembangan Anak Balita Dan Publikasi Angka Stunting di Kabupaten Rokan Hulu

Untuk mengukur pertumbuhan dan perkembangan anak balita serta melakukan kegiatan publikasi angka stunting di Kabupaten Rokan Hulu. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu melalui Dinas Kesehatan, dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa dan Juga Tim Penggerak PKK Kabupaten Rokan Hulu melakukan pengukuran pertumbuhan dan perkembangan anak balita terstruktur dan periodik. Di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 terdapat 27,3 % atau 999 anak stunted dari 3,666 balita yang ditimbang, pada tahun 2019 turun menjadi 24,3 % Angka persentase Stunting Kabupaten Rokan Hulu terus turun, dimana pada tahun 2020 angka stunting turun 6 persen menjadi 18,4 persen dan di tahun 2021 tinggal 17,9 persen atau 540 Anak Stunted dari 3.015 Balita yang ditimbang.

Tabel 7: Penurunan persentase data monitoring *stunting* Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018-2021

Tahun	Jumlah Balita yang ditimbang	Jumlah Balita Stunted	Persentase
2018	3666	999	27,3%
2019	3675	896	24,37 %
2020	3680	678	18,4%
2021	3015	540	17,9%

Sumber: e-PPGBM Dinas Kesehatan Kab. Rokan Hulu Agustus 2021, 2022

Hasil pengukuran serta publikasi angka stunting digunakan untuk memperkuat komitmen pemerintah dan masyarakat dalam gerakan bersama pencegahan stunting. Tujuan pengukuran dan publikasi angka stunting adalah:

1. Mengetahui status gizi anak sesuai umur, sehingga Kader Posyandu dapat
 - a. Memantau kemajuan pada tingkat individu.
 - b. Mengembangkan program/kegiatan yang sesuai untuk peningkatan kesadaran dan partisipasi keluarga, pengasuh, dan masyarakat untuk menjaga pertumbuhan anak balita yang optimal.
 - c. Menyediakan upaya tindak lanjut terintegrasi dan konseling dalam rangka komunikasi perubahan perilaku.
2. Mengukur prevalensi stunting di tingkat Desa, yang dilaporkan secara berjenjang mulai dari posyandu ke Dinas Kesehatan Kabupaten sebagai bahan untuk:
 - a. Peningkatan efektivitas penentuan target layanan dan pengalokasian sumber daya.
 - b. Pemecahan masalah dan memantau proses perencanaan di level Desa hingga Kabupaten.
 - c. Advokasi kepada unit-unit terkait di pemerintah daerah untuk integrasi program.

Pemanfaatan data hasil pengukuran Data hasil pengukuran digunakan untuk menghasilkan analisis sebagai berikut: a. Menilai kemajuan pada tingkat individu; untuk menunjukkan bahwa seorang anak sedang tumbuh dan berkembang secara normal atau bermasalah atau berisiko sehingga harus segera dinilai ulang. b. Menilai kemajuan pada tingkat keluarga; untuk menunjukkan pola persoalan kesehatan di tingkat keluarga yang berkontribusi pada kejadian stunting. c. Menilai kemajuan

pada tingkat RT/RW/Kelurahan/Desa; untuk menunjukkan kemajuan masalah kesehatan prioritas yang dihadapi oleh masing-masing perangkat desa

8. Melakukan Review Kinerja Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Terkait Penurunan Stunting di Kabupaten Rokan Hulu

Langkah review kinerja pelaksanaan program dan kegiatan terkait penurunan stunting di Kabupaten Rokan Hulu dilakukan secara periodik dalam hal ini dilakukan pertahun. Berdasarkan hasil analisis penelitian sebagai upaya pelaksanaan program dan kegiatan terkait penurunan stunting. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu melakukan upaya monitoring dan evaluasi dengan membentuk Tim Audit Stunting Kabupaten Rokan Hulu. Tim pelaksana adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu sebagai ketua tim, sebagai wakil ketua tim ditunjuk kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu.

Adapun yang ditunjuk sebagai tim teknis kepala puskesmas se kabupaten Rokan Hulu, camat se kabupaten Rokan Hulu, Penyuluh keluarga berencana/ petugas lapangan KB se Kabupaten Rokan Hulu dari perangkat desa, Tim Pendamping Keluarga Se Kabupaten Rokan Hulu dari perangkat desa, kader posyandu dari perangkat desa, kepala bidang pengendalian penduduk Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu, Kepala Bidang KB Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu, Kepala bidang KS Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu, kepala bidang kesehatan masyarakat (kesmas) Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu, kepala bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu, Kepala Bidang pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu.

Sebagian Tim Pakar terdiri dari Dokter spesialis anak, dokter spesialis obstetri dan ginekologi, psikolog dan ahli gizi. Masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab. Untuk penanggung jawab dalam hal ini ketua TPPS Kabupaten Rokan Hulu bertanggung jawab dan menjamin terlaksananya audit kasus stunting dan tindak lanjutnya. Untuk ketua tim audit memiliki tugas mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan audit kasus stunting berjalan lancar sesuai dengan tujuan, pedoman dan target waktu yang telah ditetapkan. Wakil ketua bertugas mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan audit kasus stunting dengan berbagai pihak terkait seperti

Rumah sakit jejaring, RSUD, Puskesmas, Posyandu, Poskesdes, polindes, klinik dan pelayanan sehat lainnya.

Tim teknis melakukan persiapan, menyusun konsep TIM Audit Stunting dan menyusun penjadwalan pelaksanaan kemudian tim teknis melakukan pelaksanaan dan koordinasi dengan tim pakar berupa, penyiapan data dan informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan audit, telekonsultasi untuk pencegahan dan penanganan kasus yang dapat ditindaklanjuti oleh tim teknis, melakukan kunjungan lapangan untuk koordinasi, konfirmasi dan verifikasi terhadap kelompok sasaran audit secara selektif, penyusunan laporan pelaksanaan audit kasus secara selektif, penyusunan laporan pelaksanaan audit stunting secara berkala. Kemudian tim pakar bertugas melaksanakan kajian kasus yang dituangkan dalam kertas kerja audit, memberikan layanan telekonsultasi serta memberikan rekomendasi atas kasus yang diaudit, melakukan kunjungan lapangan untuk koordinasi, konfirmasi dan verifikasi terhadap kelompok sasaran audit secara selektif (jika diperlukan dan memungkinkan), mendiseminasikan hasil audit kasus stunting dan juga melaksanakan pemantauan dan evaluasi rencana tindak lanjut.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian diketahui bahwa peran Lintas Sektor Dalam Konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Rokan Hulu Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu secara terstruktur dan menyeluruh seperti melakukan identifikasi sebaran *stunting*, ketersediaan program, dan kendala dalam pelaksanaan integrasi intervensi gizi, menyusun rencana kegiatan untuk meningkatkan pelaksanaan integrasi intervensi gizi, menyelenggarakan rembuk *stunting*, memberikan kepastian hukum bagi desa untuk menjalankan peran dan kewenangan desa dalam intervensi gizi terintegrasi, memastikan tersedianya dan berfungsinya kader yang membantu pemerintah desa dalam pelaksanaan intervensi gizi terintegrasi di tingkat desa, meningkatkan sistem pengelolaan data *stunting* dan cakupan intervensi, melakukan pengukuran pertumbuhan dan perkembangan anak balita dan publikasi angka *stunting* dan melakukan review kinerja pelaksanaan program dan kegiatan terkait penurunan *stunting* secara periodik. Terkait Persoalan mendasar dalam peran lintas sektor konvergensi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Rokan Hulu adalah sinkronisasi waktu dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan setiap organisasi

perangkat daerah, belum terimplementasinya standar alokasi anggaran percepatan penurunan stunting yang signifikan, serta belum optimalnya manajemen akurasi data dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Rokan Hulu.

Sebagai rekomendasi dari penelitian ini maka: *Pertama*, Perlu adanya manajemen data yang presisi (ketersediaan dan kualitas data) dari masing-masing OPD seperti DPPKB, Dinas Kesehatan, DPMPD, BPS, Disduk Capil dan OPD lainnya yang dapat menjadi rujukan dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Rokan Hulu, *Kedua*, Perlunya pengkajian program dan alokasi porsi anggaran secara signifikan pada Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Sosial, P3A, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu. *Ketiga*, Memastikan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 2 tahun 2021 Tentang Peran Desa Dalam Konvergensi Pencegahan *Stunting* Terintegrasi sudah diimplementasikan oleh pemerintah desa dengan dibuktikan adanya dukungan alokasi dana desa yang signifikan untuk percepatan penurunan stunting. *Keempat*, Perlu adanya sinergitas, kolaborasi interaktif dan kerjasama menyeluruh secara serius seluruh komponen di dalam Tim Percepatan Penanggulangan *Stunting* (TPPS) Kabupaten Rokan Hulu dalam pelaksanaan kegiatan Audit *Stunting* yang efektif. *Kelima*, Perlu adanya input dan partisipasi aktif dari seluruh partisipan baik pemerintah, swasta, media, masyarakat dan perguruan tinggi dalam pelaksanaan kegiatan rembuk *stunting* sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan target yang telah ditetapkan

REFERENSI

- Azalia, D. 2017. "Pengaruh institusi regional terhadap konvergensi kebijakan antarnegara: studi kasus ASEAN Open Skies." *Jurnal Politik* 2(2): 307–36.
- Bappedaprov.riau.go.id. 2021. "Konvergensi dalam Percepatan Penurunan Stunting." *Retrieved from*: http://bappedaprov.riau.go.id/portal/Home/Detail_berita/515-konvergensi-dalam-percepatan-penurunan-stunting diakses pada 22 Juni 2022.
- Bappenas. 2018. Dokumen Rencana Aksi Nasional dalam Rangka Penurunan Stunting *Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten/Kota*. Jakarta.

- BAPPENAS. 2019. "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024." *Jakarta: Bappenas.*
- Creswell, John W. 2014. "Qualitative, quantitative and mixed methods approaches."
- Dinas Kesehatan Provinsi Riau.* 2021. Pekanbaru: Riau.
- Hartati, Seri, Amir Syamsuadi, Liza Trisnawati, dan Andre Ray Septephan. 2022. "Peran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru dalam Meningkatkan Minat Baca Masyarakat." *EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN* 4(6): 7801–10.
- Iqbal, Hasan. 2002. "Pokok-pokok materi metodologi penelitian dan aplikasinya." *Jakarta: Ghalia Indonesia.*
- Iqbal, Muhammad, dan Rahmadani Yusran. 2021. "Upaya Konvergensi Kebijakan Pencegahan Stunting Di Kota Padang." *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)* 3(2): 109–16.
- Kementerian PPN/ Bappenas. 2018. "Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten/Kota." *Rencana Aksi Nasional dalam Rangka Penurunan Stunting: Rembuk Stunting* (November): 1–51.
- Rahmawati, Tuti. 2020. "Pengarusutamaan Konsep Reformasi Sistem Kesehatan dalam RKPD Provinsi Riau Tahun 2021." *Majalah Media Perencana* 1(1): 82–96.
- Rahmawati, Tuti, dan Heryudarini Harahap. 2022. "The Intervention Service Coverage on Convergence Action to Reduce Stunting in Riau Province Priority Districts, Indonesia." *Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences* 10(T8): 200–206.
- Rozikin, Mochamad. 2019. "Kolaborasi Antar Stakeholders Penta Helix Dalam Pengembangan Kota Kreatif (Studi di Kota Malang)." *PANGRIPTA Jurnal Ilmiah Kajian Perencanaan Pembangunan* 2(2): 49–57.
- Sahroji, Qotrun Nada, Rahmat Hidayat, dan Rudyk Nababan. 2022. "Implementasi Kebijakan Dinas Kesehatan Dalam Penanganan Stunting Di Kabupaten Karawang." *Jurnal Pemerintah dan Politik* 7(1): 34–39.
- Saputri, Rini Archda. 2019. "Upaya pemerintah daerah dalam penanggulangan stunting di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung." *Jdp (Jurnal Dinamika Pemerintahan)* 2(2): 152–68.
- Schroder, P. 2010. *Strategi Politik*. Edisi Ceta. ed. Avantie Agoesman. Jakarta: Friedrich-Naumann.
- Siswanto, Bedjo. 2021. *Pengantar manajemen*. Bumi Aksara.
- Sunaryo, Dian Rosa, dan Ria Arifianti. 2022. "Penanggulangan Stunting Di Kabupaten Bandung." 4: 205–13.
- Syamsuadi, Amir, Seri Hartati, Liza Trisnawati, dan Diki Arisandi. 2020. "Strategi

- Kebijakan Pengembangan Sagu Berbasis Sentra Industri Kecil Menengah (IKM).” *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik (JISoP)* 2(2): 114–28.
- Tampubolon, Dahlan. 2020. “Kebijakan Intervensi Penanganan Stunting Terintegrasi.” *Jurnal Kebijakan Publik* 11(1): 25.
- tnp2k.go.id. 2018. “Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting) Periode 2018-2024.” *Retrieved from* <https://tnp2k.go.id/filemanager/files/Rakornis%202018/Stranas%20Percepatan%20Pencegahan%20Anak%20Kerdil.pdf> diakses pada 01 Oktober 2022.
- TNP2K. 2017. 1 *100 Kabupaten/Kota Prioritas untuk Intervensi Anak Kerdil (Stunting)*. I. Jakarta: TNP2K SETWAPRES RI.
- Tp-pkk.rokanhulukab. 2022. “Prevalensi Stunting Kabupaten Rokan Hulu.” *Retrieved from* : <https://tp-pkk.rokanhulukab.go.id/views/prevalensi-stunting-kabupaten-rokan-hulu> diakses pada 22 Juni 2022.
- Trisnawati, Liza, Amir Syamsuadi, Seri Hartati, dan Intan Reskiyanti. 2021. “Koordinasi Pemerintah dan Swasta dalam Program Corporate Social Responsibility (CSR) School Improvement di Kabupaten Pelalawan.” *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)* 3(2): 115–23.
- Tursini, Tursini, Jasrida Yunita, Zainal Abidin, dan Mitra Mitra. 2022. “Analisis Pelaksanaan Intervensi Gizi Spesifik Dalam Penanganan Balita Stunting.” *Jurnal Kesehatan* 13.
- Veithzal, Rivai, dan Deddy Mulyadi. 2003. “Kepemimpinan dan perilaku organisasi.” *Jakarta: Raja Grafindo Persada*.
- Yulianti, Devi. 2017. “Program Generasi Berencana (GenRe) Dalam Rangka Pembangunan Manusia Menuju Pembangunan Nasional Berkualitas.” *Jurnal Analisis Sosial Politik* 1(2): 93–108.